



Laporan Kinerja

BAPPERIDA

Kota Samarinda

Tahun 2025



Samarinda, 3 Januari 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, sebagai perwujudan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025–2029, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Kinerja yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah **"Samarinda Maju untuk Kaltim Maju"**. Yang dijabarkan menjadi 5 (lima) misi, yaitu :

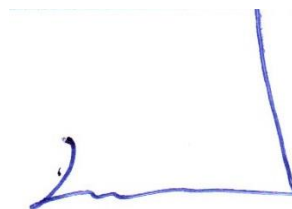
- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.**
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.**
- 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel**

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diberikan. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat khususnya Bapperida Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 3 Januari 2026

Kepala BAPPERIDA,



H. Ananta Fathurrozi, S. Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681209 198803 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban BAPPERIDA Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Secara umum BAPPERIDA Kota Samarinda telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian sasaran maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan Tahun 2025 . Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025 antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan dan

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja.

2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah.

Dengan adanya 2 (Dua) capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 rata-rata sebesar 97,34 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran dengan katagori sangat baik.

Sedangkan Total pagu anggaran DPA BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 sebesar Rp. 44.525.024.314 dengan realisasi sebesar Rp. 41.906.742.689 atau sebesar 94,12% dari total pagu anggaran DPA Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	9
1. TUGAS DAN FUNGSI	9
2. SUSUNAN ORGANISASI.....	11
3. SISTEMATIKA.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
1. Visi dan Misi.....	16
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
a. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
b. Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.....	39
c. Analisis Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.....	40
BAB IV PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Upaya Perbaikan Kedepan.....	111

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2026.....	24
TABEL 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BAPPERIDA Kota Samarinda.....	20
TABEL 3. 1 Hasil Penilaian SAKIP Bappedalitbang tahun 2022 dan 2023	27
TABEL 3. 2 Rekomendasi Sesuai LHE AKIP 2023 dan Tindak Lanjutnya.....	37
TABEL 3. 3 Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samrinda Tahun 2024.....	40
TABEL 3. 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
TABEL 3. 5 Sasaran Strategis, Indikator, Target, realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran	43
TABEL 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Penilaian dan tahun sebelumnya.....	43
TABEL 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	44
TABEL 3. 8 Identifikasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	49
TABEL 3. 9 Gambaran Singkat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rancana Aksi Pendukung Sasaran Strategis 1 (2024).....	50
TABEL 3.10 Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	65
TABEL 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Penilaian Denga Tahun Sebelumnya (Strategis 2).....	66
TABEL 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (Strategi 2).....	66
TABEL 3.13 Identifikasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran (Strategis 2).....	69
TABEL 3.14 Gambaran Singkat Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan dn Rencana Aksi Pendukung Sasaran Strategis 2 (2024).....	70
TABEL 3.15 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran.....	82
TABEL 3.16 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3).....	82
TABEL 3.17 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Strategis 3).....	83
TABEL 3.18 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (stategis 3).....	87
TABEL 3.19 Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 3.....	93
TABEL 3.20 Realisasi Anggaran Belanja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2024.....	94
TABEL 3.21 Perbandingan Pagu dan realisasi Anggaran Bapperida Kota Samarinda Tahun 2022-2024	110

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Struktur Organisasi Bapperida Kota Samarinda.....	17
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ivonasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Samarinda.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ivonasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ivonasi Daerah Kota Samarinda.
2. Mendorong Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ivonasi Daerah Kota Samarinda didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ivonasi Daerah Kota Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.

Bapperida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan
2. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi

di Daerah.

5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
7. Pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
8. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta Riset dan Inovasi. Pada tahun 2025, isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda dapat dirumuskan dalam gambar dibawah berikut ini :

No.	RUMUSAN MASALAH	ISU STRATEGIS
1.	Kualitas perencanaan kinerja Pembangunan daerah dan perangkat daerah belum optimal	Perlunya peningkatan kapasitas dan sistem perencanaan pembangunan daerah
2.	Pengukuran kinerja belum optimal	Lemahnya sistem evaluasi pembangunan berbasis hasil
3	Indeks Inovasi Daerah belum mencapai kategori "sangat inovatif"	Lemahnya ekosistem riset dan inovasi daerah berbasis potensi lokal

C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dijabarkan dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda, sebagai berikut:

Susunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) orang, terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural : 8 Orang
- b. Jabatan Fungsional Penyetaraan : 16 Orang
- c. Jabatan Fungsional : 7 Orang
- d. Staf / PNS : 38 Orang
- e. Honorer PTTB : 18 Orang
- f. Honorer PTTH : 10 Orang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan:
 - a. S.3 : PNS 1 orang
 - b. S.2 : PNS 17 orang
 - c. S.1 : PNS 38 orang
 - d. Diploma : 1 Orang
 - e. S L T A : PNS 9 orang
2. Jenis Kepegawaian : Pegawai menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 69 orang, pegawai honorer PTTB sebanyak 18 orang, PTTH 10

orang.

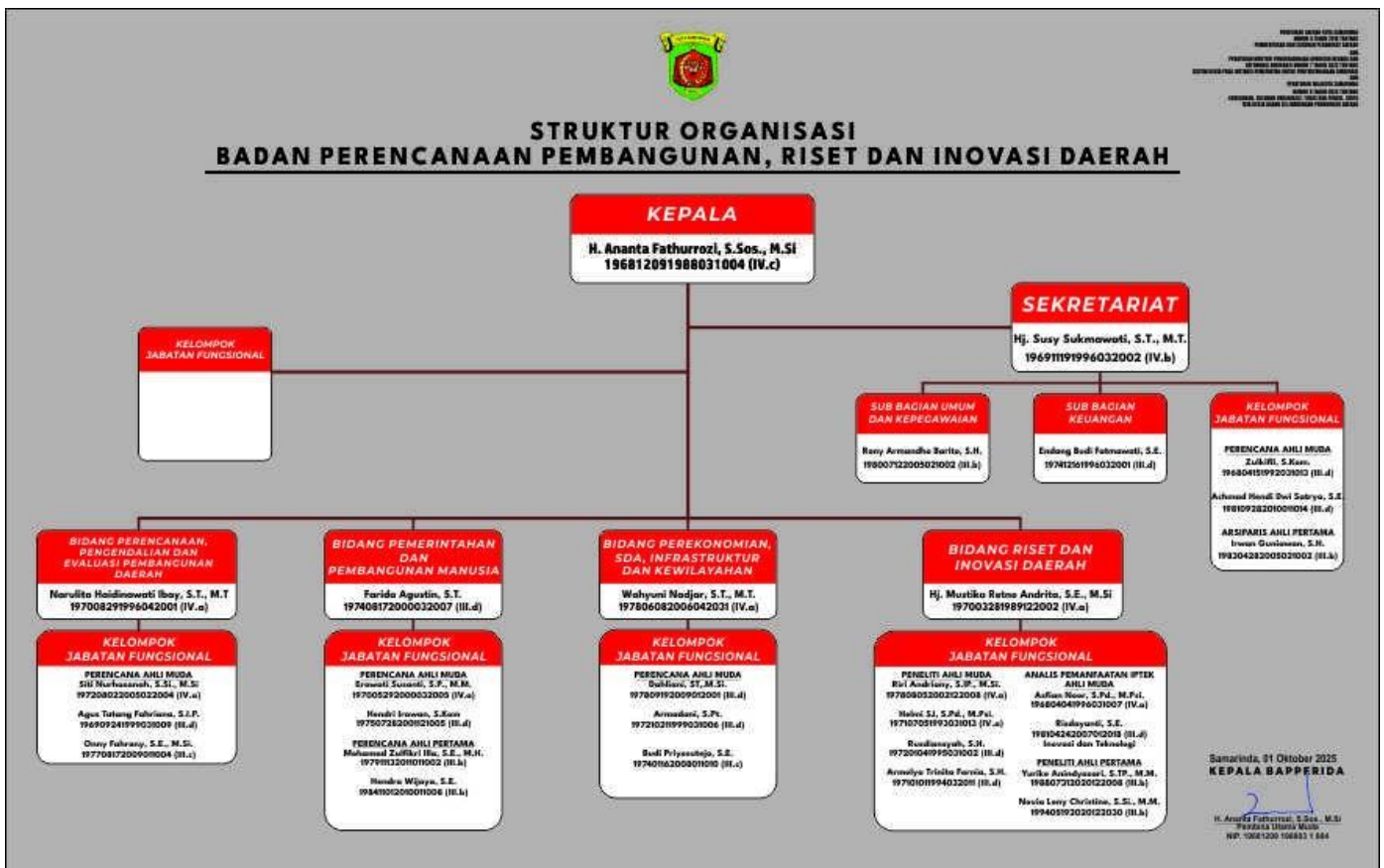
Setelah melakukan pencermatan lingkungan internal dan eksternal, maka aspek-aspek strategik organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja
- 2) Integrasi pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratik, dan Spasial)
- 3) Pengembangan kapasitas perencana daerah melalui pelatihan teknis dan manajemen kinerja
- 4) Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak
- 5) Fasilitasi riset kebijakan untuk mendukung inovasi pelayanan
- 6) Replikasi dan diseminasi praktik inovasi daerah.
- 7) Integrasi inovasi ke dalam sistem digital dan tata kelola

Secara rinci struktur organisasi BAPPERIDA Kota Samarinda terdapat pada gambar 1:

GAMBAR 1

Struktur Organisasi BAPPERIDA Kota Samarinda



D. SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelesan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan sampai kepada pengukuran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah Kota Samarinda menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

A. Visi dan Misi

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (*stakeholder*), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Ikonasi Daerah sebagai instansi dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi Kota Samarinda di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029,

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

yaitu:

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan mengandalkan potensi sumber daya, kemampuan yang dimiliki dan tanggung jawab dari seluruh aparatur BAPPERIDA Kota Samarinda agar seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas ke pemerintahannya. Misi Kota Samarinda di dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.**
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.**
- 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel**

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rencana Strategik yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun tujuan Renstra BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Daerah”. Dokumen perencanaan merupakan panduan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan di daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara dokumen perencanaan pusat, provinsi dan kota, dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen perencanaan dan implementasinya. Konsistensi dan sinergitas inilah yang diharapkan dapat memberi nilai tambah positif bagi masyarakat sehingga kesejahteraan di Kota Samarinda dapat diwujudkan. Disamping konsistensi dan sinergitas, dokumen perencanaan yang bermutu dihasilkan melalui berbagai pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis serta pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan teknokratik diartikan sebagai sebuah metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metode dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Pendekatan partisipatif diartikan sebagai proses melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan dan adanya kesepakatan. Berdasarkan tujuan BAPPERIDA Kota Samarinda, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan indikator sebagai berikut:
 - Nilai SAKIP kota komponen perencanaan kinerja
 - Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja
- b. Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik, dengan indikator sebagai berikut:
 - Indeks Inovasi Daerah

Dari rumusan tujuan dan indikatornya maka strategi untuk pencapaian sasaran di BAPPERIDA Kota Samarinda sebagai berikut :

- Strategi 1 : Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja
- Strategi 2 : Integrasi pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratik, dan Spasial)
- Strategi 3 : Pengembangan kapasitas perencana daerah melalui pelatihan teknis dan manajemen kinerja
- Strategi 4 : Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak
- Strategi 5 : Fasilitasi riset kebijakan untuk mendukung inovasi pelayanan
- Strategi 6 : Replikasi dan diseminasi praktik inovasi daerah
- Strategi 7 : Integrasi inovasi ke dalam sistem digital dan tata kelola

Berikut kebijakan yang telah dirumuskan untuk mendukung pelaksanaan strategi adalah :

- Strategi 1 : Sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja, dengan kebijakan Penguatan sistem perencanaan berbasis data dan indikator kinerja Pembangunan
- Strategi 2 : Integrasi pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratik, dan Spasial), dengan kebijakan : Penguatan sistem evaluasi Pembangunan dan SPIP
- Strategi 3 : Pengembangan kapasitas perencana daerah melalui pelatihan teknis dan manajemen kinerja, dengan kebijakan : Optimalisasi sistem manajemen kinerja internal dan SDM perencana
- Strategi 4 : Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi multipihak, dengan kebijakan: Pengembangan inovasi perencanaan dan digitalisasi layanan publik
- Strategi 5 : Fasilitasi riset kebijakan untuk mendukung inovasi pelayanan, dengan kebijakan: Pengembangan inovasi perencanaan dan digitalisasi layanan publik
- Strategi 6 : Replikasi dan diseminasi praktik inovasi daerah, dengan kebijakan: Pengembangan inovasi perencanaan dan digitalisasi layanan publik

Strategi 7 : Integrasi inovasi ke dalam sistem digital dan tata kelola, dengan kebijakan: Pengembangan inovasi perencanaan dan digitalisasi layanan publik

TABEL 2.1
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	22	22,5	23	23,5	24	24,5
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	17,45	17,70	17,95	18,20	18,45	18,70
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	60,50	61	61,50	62	62,50	65,01

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pernyataan perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025 di Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	22
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	17,45
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	60,50

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAPPERIDA KOTA SAMARINDA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.261.375.398	APBD Perubahan 2025
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	10.142.513.743	APBD Perubahan 2025
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.802.985.987	APBD Perubahan 2025
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.318.149.186	APBD Perubahan 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sakip Bapperida Tahun 2025

1) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Hasil Penilaian SAKIP Bappeda tahun 2023 & 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	2023			2024		
		INSTANSI			INSTANSI		
		BOBOT	Jawaban	NILAI (%)	BOBOT	Jawaban	NILAI (%)
1	PERENCANAAN KINERJA	30	27	90	30	28	93,33
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedla	6	5,5	91,66	6	6	100
Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan setiap satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja (Perjanjian kinerja)	1	1	100	1	1	100
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.	1	1	100	1	1	100
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.	2	2	100	2	2	100
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1	1	100	1	1	100
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	1	0,5	50	1	1	100

1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logika, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7,5	83,33	9	8,5	94,44
Kriteria:							
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	1	0,5	50	1	1	100
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.	1	1	100	1	1	100
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	1	1	100	1	0,5	50
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.	1	1	100	1	1	100
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.	1	0	0	1	1	100
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	1	1	100	1	1	100
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.	1	1	100	1	1	100
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang	1	1	100	1	1	100

	akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)						
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	1	1	100	1	1	100
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	14	93,33	15	13,5	90
Kriteria:							
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.	2	2	100	2	2	100
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.	2	2	100	2	0,5	25
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	2	2	100	2	2	100
4	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	3	2	66,66	3	3	100
5	Setiap sub unit memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	3	3	100	3	3	100
6	Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	3	3	100	3	3	100
2	PENGUKURAN KINERJA	30	21	70	30	15	50
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	4	66,66	6	5	83,33

Kriteria:							
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	2	2	100	2	2	100
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	2	2	100	2	1	50
3	Terdapat mekanismae yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	2	0	0	2	2	100
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	8	88,88	9	2,5	27,78
Kriteria :							
1	Pimpinan selalu terliobat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja	2	2	100	2	1	50
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	1	1	50	2	0	0
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	2	2	100	2	1	50
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	1	1	100	1	0,5	50
5	Pengumpulan data kinerja ialah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	2	2	100	2	0	100
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberlan Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi datam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	65	9,75	15	7,5	50

Kriteria :							
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan	2	2	100	2	2	100
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.	2	1	50	2	1	100
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi panyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.	2	1	50	2	0	0
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.	2	1	50	2	0	0
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	2	1	50	2	2	100
6	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	2	0	0	2	1	50
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	2	2	100	2	0,5	25
8	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	1	1	100	1	1	100
3	PELAPORAN KINERJA	15	9,75	65	15	11,25	75
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3	2,5	83,33	3	2,75	91,67
Kriteria :							
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun	1	1	100	1	1	100

2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	0,5	0	0	0,5	0,5	100
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	0,5	0,5	100	0,5	0,25	50
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya Perbaikan/ penyempurnaannya	4,5	2,5	55,55	4,5	2,75	61,11
Kriteria :							
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	0,5	0,25	50	0,5	0,25	50
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA	0,5	0	0	0,5	0	0
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	0,5	0	0	0,5	0,5	100
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional	0,5	0	0	0,5	0	0

7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta Upaya nyata dan / atau hambatan	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi alas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	0,5	0	9	0,5	0	0
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	0,5	0,5	100	0,5	0,5	100
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebljakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	5	66,66	7,5	5,75	76,67
Kriteria :							
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	1,5	1,5	100	1,5	1,5	100
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	1	0,25	25	1	0,5	50
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	1	0,5	50	1	1	100
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1	0,5	50	1	1	100
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	1	1	100	1	0,5	50
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian	1	1	100	1	1	100

	perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.						
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	1	0,25	25	1	0,25	25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	15,5	62	25	17,5	70
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4	80	5	5	100
Kriteria :							
1	Terdapat pedoman teJmis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2	2	100	2	2	100
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	3	2	66,66	3	3	100
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,5	6,5	86,66	7,5	6,5	86,66
Kriteria :							
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	2	2	100	2	2	100
2	Evaluasi Akuntabililas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	2	1	50	2	2	100
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	2	2	100	2	1	50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	1,5	1,5	100	1,5	1,5	100
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas	12,50	5	40	12,5	6	48,50

dan efisiensi Kinerja							
Kriteria :							
1	Seluruh rekomendasi alas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	4	2	50	4	2	50
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja	4	2	50	4	3	75
3	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	4,5	1	22,22	4,5	1	22,22
TOTAL NILAI (PREDIKAT)		100	73,25	73,25	100	71,75	71,75

Terdapat penurunan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Bapperida tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai SAKIP dari 73,25 menjadi 71,75. Meskipun demikian kategori penilaian BB.

2) Tindak lanjut atas Rekomendasi Sesusai LHE AKIP 2024 dari Inspektorat Kota Samarinda.

Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan kepada Bapperida Kota sebagai Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2024. Tabel 3.2 menjabarkan Rekomendasi Sesusai LHE AKIP 2024 tersebut serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh BAPPERIDA Kota Samarinda .

Tabel 3.2 Rekomendasi Sesusai LHE AKIP 2024 dan Tindak Lanjutnya

No.	Rekomendasi Sesusai LHE AKIP 2023	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Dokumen Renstra dan Renja agar menggambarkan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja yang selaras	Sudah Tindaklanjuti	Dokumen tersedia
2	Aktivitas yang dilaksanakan dalam rencana aksi sudah memuat program, kegiatan, sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja Jika rencana aksi sudah memuat program, kegiatan, sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap triwulan telah dimanfaatkan untuk mendukung kinerja	Sudah Tindaklanjuti	Dokumen tersedia
3	Pimpinan agar selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dalam setiap laporan monitoring dan evaluasi per triwulan didukung dengan undangan rapat pembahasan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
4	Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan dan mendukung mengukur capaian kinerja berdasarkan fakta, sumber data dan formulasi perhitungan capaian kinerja (IKU) yang dapat dipertanggungjawabkan	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
5	Melakukan pengukuran kinerja untuk eselon II, III dan IV secara berkala	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
6	Melakukan pemantauan secara berkala per triwulan per bidang dengan membuat laporan pengukuran kinerja per bidang	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia

7	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja agar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
8	Membuat laporan pengukuran kinerja didukung dengan bukti dukung berupa undangan rapat, pembahasan capaian kinerja, notulen pembahasan capaian kinerja terkait penyesuaian strategi, daftar hadir dan dokumentasi dan terdapat penjelasan penyesuaian strategi dalam renja perubahan	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
9	Membuat laporan pengukuran kinerja didukung dengan bukti dukung berupa undangan rapat, pembahasan capaian kinerja, notulen pembahasan capaian kinerja terkait penyesuaian kebijakan, daftar hadir dan dokumentasi dan terdapat penjelasan penyesuaian kebijakan dalam renja perubahan	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
10	Membuat laporan pengukuran kinerja didukung dengan bukti dukung berupa undangan rapat pembahasan capaian kinerja, notulen pembahasan capaian kinerja terkait penyesuaian aktivitas daftar hadir dan dokumentasi dan terdapat penjelasan penyesuaian aktivitas dalam renja perubahan	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
11	Membuat penjelasan atas efisiensi atas penggunaan anggaran dan perbandingan 2 tahun sebelumnya atas efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan DPA, LRA didalam laporan kinerja	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia

12	Melakukan pengukuran kinerja seluruh pejabat struktural eselon II dan eselon III pertriwulan	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
13	Laporan Kinerja yang telah disusun agar ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan mencantumkan nomor, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan kepala perangkat daerah dan stempel	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
14	Laporan Kinerja agar disusun sesuai standar format, sistematika dan substansi lampiran II Permen PAN & RB No.53 Tahun 2014	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
15	Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan target RENSTRA	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
16	Laporan Kinerja agar menginfokan ada atau tidak perbandingan realisasi kinerja diperangkat daerah dengan realisasi kinerja dilevel Provinsi/ Nasional	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
17	Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran, sdm, atau sarana prasaran dalam mencapai kinerja	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
18	Laporan kinerja agar menginfokan penyesuaian aktivitas dari renja perubahan dan evaluasi kinerja yang digunakan untuk mencapai kinerja	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia

19	Laporan Kinerja agar menginfokan pencapaian keberhasilan kinerja yang memuat keberhasilan atau kegagalan target, program dan kegiatan	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
20	Laporan kinerja agar menginfokan perubahan budaya kinerja organisasi, perubahan budaya kinerja pada pegawai, target kinerja mencapai 100%, adanya efisiensi anggaran, menurunnya angka pelanggaran atau hukuman pada pegawai, rekomendasi jika terdapat kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
21	Membuat laporan evaluasi capaian kinerja internal dengan pendalaman yang memadai dengan menyajikan target kinerja, realisasi kinerja, faktor permasalahan, faktor hambatan, rekomendasi dan tindak lanjut, dan laporan telah diformalkan - Dilengkapi dengan bukti rapat evaluasi (undangan, daftar hadir, notulen rapat) - Dilengkapi dengan kertas kerja evaluasi dan dokumen pendukung	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
22	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti dengan perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan LHE Inspektorat	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
23	Terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas dengan indikator peningkatan nilai evaluasi SAKIP	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia
24	Terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja pada hasil laporan evaluasi SAKIP dengan peningkatan nilai SAKIP, Target tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya.	Sudah Tindaklanjuti	Laporan Tersedia

B. Pengukuran Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025

Pada tahun 2025 sasaran strategis dan indikator kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda, sasaran strategis ada 2 sedangkan indikator kinerja ada 3, Tingkat capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025, diperoleh hasil dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

TABEL 3.3

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA BAPPERIDA KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	22	21,24	Nilai	97,72
		Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	17,45	16,95	Nilai	97,13
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	60,50	58,80	Nilai	97,19
RATA-RATA						97,34

C. Analisis Capaian Kinerja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025

Bapperida Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penyusunan analisis capaian kinerja organisasi (Bapperida Kota Samarinda) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dinilai;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dinilai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yakni:

Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA NILAI REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017

I. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran ini menggambarkan kinerja organisasi dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian target dari program-program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah perlu diupayakan untuk berjalan secara optimal dan mencapai target yang ditetapkan. Alat ukur kinerja sasaran pertama adalah Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja tahun 2025 yang mencapai target yang telah ditetapkan. Program prioritas dikategorikan sebagai program yang "Tercapai" realisasi kinerjanya jika memiliki capaian di atas 90%. Nilai ini mengadopsi skala nilai peringkat kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI tersebut membagi peringkat kinerja menjadi lima kelas, di mana nilai capaian di atas 91% dikategorikan sebagai

realisasi kinerja sangat tinggi.

Tabel beserta uraian selanjutnya akan memberikan gambaran mengenai Sasaran Strategis, Indikator yang digunakan, target, serta realisasi dari kinerja strategis (sasaran) pertama.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.5 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	22	21,24	Nilai	97,72
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	17,45	16,95	Nilai	97,13
RATA-RATA					97,43

Kinerja strategis 1 Bapperida Kota Samarinda tahun 2025 mencapai 97,43%. Walaupun masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan. Pembahasan/analisis secara komprehensif mengenai realisasi dan capaian kinerja strategis 1 akan dilakukan bersamaan setelah proses analisis terhadap capaian tahun sebelumnya serta analisis lainnya dilakukan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21,20	21,28	21,50	21,33	22	21,24
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	17,00	17,04	17,20	17,23	17,45	16,95

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 masih di bawah target yang ditetapkan atau capaian kinerja tidak mencapai 100% melainkan sebesar 97,43%. Nilai capaian dapat dikatakan "Sangat Tinggi" walaupun belum mencapai target yang ditetapkan (100%). Observasi periodik melalui perbandingan dengan tahun sebelumnya (2024) juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2025, Nilai Sakip Kota Komponen Perencanaan Kinerja dan Komponen Pengukuran Kinerja yang mencapai target adalah 97,43%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bapperida 2025 – 2029)

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	22	21,24	Capaian sebesar 97,43 %

Daerah					
	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	17,45	16,95	

Pada tahun 2025 perencanaan jangka menengah 2025–2029, sasaran strategis pertama memiliki capaian sebesar 97,43 % walaupun belum mencapai target 100% namun dapat dikategorikan sebagai pencapaian “Sangat Tinggi”.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Bapperida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikatornya Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja tidak ada perbandingan realisasi baik Provinsi dan Nasional karena hasil nilai sakipnya dikeluarkan oleh Menpan RB.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Tercapai atau tidaknya target kinerja program sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang dapat dikendalikan maupun hal di luar kendali Bapperida & Perangkat Daerah. Indikator program memiliki karakter manfaat,

yakni kondisi positif apa yang dapat dirasakan/dinikmati sekalipun. Karena sifat dari pencapaian program adalah manfaat secara luas, pada berbagai kondisi target program dapat dicapai jika terdapat kinerja pihak/stakeholder lainnya, misal: Pemerintah Pusat, sektor swasta, kelompok masyarakat, dsb.

Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong keberhasilan organisasi dalam mengupayakan tercapainya target kinerja program. Beberapa diantaranya adalah:

- 1) Kemampuan untuk menentukan target kinerja berdasarkan data & analisis yang akurat dan mutakhir. Dengan memahami bagaimana sebuah program berjalan serta bagaimana sebuah program dapat mencapai target manfaat yang diharapkan, perencana dapat menentukan target yang mungkin dicapai sesuai dengan sumber daya yang tersedia, baik waktu, biaya/anggaran, serta sumber daya lainnya
- 2) Koordinasi yang efektif serta keselarasan substansi antara proses perencanaan dan penganggaran. Target yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan hendaknya didukung dengan alokasi anggaran. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara cermat dan teliti agar penggunaannya tepat sasaran
- 3) Proses pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara konsisten. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja sebuah program. Pemantauan/evaluasi hendaknya dilaksanakan secara berkala

agar jika terdapat kendala, dapat segera diselesaikan dan apabila kinerja program berbeda dari yang direncanakan, langkah antisipatif dapat dilakukan.

- 4) Kemampuan perencana dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Target kinerja Pemerintah Daerah hendaknya didukung oleh aksi yang diturunkan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perencana (personil Bapperida Kota Samarinda) perlu memastikan bahwa target strategis pemerintah daerah hingga visi misi daerah didukung oleh kinerja strategis perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)

Sementara itu, faktor yang dapat menyebabkan penurunan kinerja organisasi, dalam hal ini kinerja Bapperida untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat terlaksana, tepat sasaran, dan mencapai target yang ditetapkan, adalah negasi atau kebalikan dari faktor faktor yang disebutkan di atas. Tidak optimalnya analisis untuk memprediksi target, kurangnya akurasi dalam menentukan indikator dan target kinerja, koordinasi yang belum optimal dan efektif, tidak terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta belum optimalnya fungsi Bapperida dalam pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, menjadi faktor yang dapat menurunkan kinerja organisasi. Di samping kondisi-kondisi tersebut, penurunan kinerja Bapperida Kota Samarinda dapat dipengaruhi oleh Jumlah

indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali Bapperida dan Perangkat Daerah. Semakin banyak indikator yang pencapaian targetnya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan di luar kendali aparatur, maka nilai kinerja organisasi semakin rentan mengalami fluktuasi dan dapat dikatakan sulit untuk memastikan bahwa dengan aksi atau upaya tertentu, suatu target dapat dicapai. Contoh dari faktor tersebut misalnya kinerja organisasi lainnya (Pemerintah Pusat, Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta, stakeholder pembangunan lainnya), kebijakan oleh Pemerintah Pusat, kondisi alam, dan sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapperida Kota Samarinda. Kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan olah pikir Sumber Daya Manusia di Bapperida Kota Samarinda. Peningkatan kapasitas dapat membantu perencana untuk meningkatkan kompetensinya dalam melakukan analisis data, interpretasi data dan fenomena pembangunan dan mengaitkannya dengan hal yang berpengaruh pada pembangunan daerah, termasuk kinerja perencanaan di perangkat daerah.
2. Mengupayakan serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Memastikan proses verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan dengan tepat mutu terutama keselarasannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan proses ini dapat

diimplementasikan serta terukur, Bapperida telah memasukkan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas perencanaan. Aspek keselarasan ini menjadi salah satu komponen dalam indikator "Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja dan komponen Pengukuran Kinerja.

4. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara konsisten tiap Triwulan. Tahapan ini juga telah didukung dengan pemanfaatan Teknologi Informasi, yakni melalui aplikasi DALEV

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal. Tabel 3.8 menggambarkan faktor yang akan dikalkulasi untuk memperoleh gambaran efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 3.8 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
--------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	96,37	92,35	7,65
	Nilai SAKIP Kota komponen Pengukuran Kinerja			

Menggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis kesatu. Kinerja anggaran adalah sebesar 92,35% dengan capaian kinerja 96,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, upaya untuk mencapai kualitas perencanaan Pembangunan Daerah telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 7,65%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya pencapaian target sasaran "Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja" didukung oleh pelaksanaan "Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp. 10.142.513.743,- dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Anggaran Sebesar Rp. 3.802.985.987,-. Secara lebih mendetail, kinerja program tersebut serta uraian aksi disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Gambaran Singkat Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 1 (2025)

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	AKSI
-----------------------------------	-----------	--------	--------	------

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Presentase capaian kinerja seluruh perangkat daerah	%	90	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	4	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	Penyusunan RPJMD/RKPD
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	Pelaksanaan Konsultasi Publik
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPDP)	Dokumen	2	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keterisian data perangkat daerah	Dokumen	4	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	2	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	80	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kerja sama	1	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	%	90	

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	8	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	8	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	8	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi dan mengarahkan kualitas belanja daerah. Perencanaan yang akurat, berbasis data, ditopang oleh pengetahuan, dan dinamika pembangunan yang mutakhir menjadi awal untuk menjamin bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar dibelanjakan untuk menjawab permasalahan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, program ini memiliki sasaran untuk memastikan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari proses perencanaan perlu dipastikan didukung dengan anggaran yang memadai. Terdapat tiga kegiatan yang menjadi turunan operasional dari program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Kegiatan tersebut yakni (1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, (2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, (3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Kejadiannya yakni (1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), (3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut bersifat saling berhubungan dari hulu hingga hilir. Proses perencanaan hingga penetapan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai stakeholder (partisipatif) dilaksanakan melalui kegiatan pertama. Selanjutnya, untuk menyusun substansi perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dilakukan pengumpulan data serta analisis yang berbasis ilmu pengetahuan, data dan fakta, yang dilaksanakan melalui kegiatan

kedua. Untuk memastikan hasil perencanaan diimplementasikan dan memperoleh target yang diharapkan serta tepat sasaran, dilaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pengendalian daerah melalui kegiatan ketiga sedangkan untuk Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kegiatan ini menselaraskan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), kegiatan ini menselaraskan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, kegiatan ini menselaraskan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Tabel 3.9 menunjukkan hal mendetail terkait sub kegiatan beserta rencana aksi yang disusun untuk menjadi arahan kinerja tahun 2025.

II. Sasaran : Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik

Sasaran strategis kedua dari kinerja Bapperida Kota Samarinda berkaitan dengan meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.10 Sasaran Strategis, Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	60,5	58,27	Nilai	96,31

--	--	--	--	--	--	--

Kinerja strategis 2 Bapperida Kota Samarinda tahun 2025 mencapai 96,31%. Walaupun masuk dalam kategori "Tinggi" masih ada aspek yang perlu menjadi perhatian, evaluasi, dan perbaikan kinerja kedepan. Pembahasan/analisis secara komprehensif mengenai realisasi dan capaian kinerja strategis 2 akan dilakukan bersamaan setelah proses analisis terhadap capaian tahun sebelumnya serta analisis lainnya dilakukan.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (strategis 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	61	59,20	64	57,12	60,5	58,27

Pencapaian kinerja strategis kedua perlu ditingkatkan karena belum menunjuk kinerja yang optimal sebab target-target belum tercapai 100% walaupun nilainya Katagori Inovatif.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bapperida 2025 – 2029)

Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (strategis 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60,5	58,27	Capaian sebesar 96,31 %

Pada tahun 2025 perencanaan jangka menengah 2025–2029, sasaran strategis kedua memiliki capaian sebesar 96,31% walaupun belum mencapai target 100% namun dapat dikategorikan sebagai pencapaian “Sangat Tinggi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Bapperida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik dengan indikatornya Indeks Inovasi Daerah tidak ada perbandingan realisasi baik Provinsi dan Nasional karena hasil nilai indeksnya dikeluarkan oleh Mendagri.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

a. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja

1. Tingkat kematangan inovasi (kualitas inovasi) yang dihimpun oleh Bapperida. Nilai untuk tiap inovasi masih bervariasi. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat nilai inovasi dengan rata-rata bawah,

menengah dan tinggi. Bahkan, ada beberapa inovasi yang tidak melakukan input dokumen yang menyebabkan inovasi terkait tidak dapat dinilai.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bapperida Kota Samarinda di bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) dalam hal melakukan tahapan pendampingan pada inovator masih perlu ditingkatkan. Pendampingan secara intens merupakan sesuatu yang krusial, karena dapat mengoreksi kualitas inovasi yang dihimpun. Pendampingan dapat memberikan motivasi bagi inovator, bahkan dapat membantu memberikan solusi bagi inovator yang menemui kendala dalam melengkapi dokumen inovasi yang dimiliki.
 3. Pemanfaatan Aplikasi yang dimiliki oleh Bapperida Kota Samarinda (Jarsiplus) secara lebih maksimal. Peningkatan kualitas aplikasi masih harus dilakukan dengan menambahkan beberapa menu di dalamnya demi kelancaran dan kemudahan yang lebih baik lagi bagi semua orang yang memanfaatkan aplikasi Jarsiplus.
- b. Solusi yang telah dilakukan (langkah perbaikan yang telah dilakukan)
1. Melakukan kegiatan yang bersifat forum dan sosialisasi untuk pengisian Indeks Inovasi Daerah dan Lomba Inovasi BAIMBAI. Sosialisasi tersebut bertujuan agar dapat memberikan pemahaman yang luas kepada semua inovator tentang tata cara penilaian Indeks Inovasi Daerah serta penilaian Lomba Inovasi BAIMBAI.
- c. Solusi yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja

1. Melakukan kegiatan sosialisasi secara terpisah untuk masing-masing pengisian Indeks Inovasi Daerah dan Lomba BAIMBAI 2026. Tindakan ini dilakukan agar kedua hal tersebut dapat dipahami sebagai dua (2) urusan yang berbeda dari sudut pandang inovator se-Kota Samarinda sehingga meminimalisir karancuan persepsi yang dapat terjadi.
2. Melakukan kegiatan pendampingan kepada para inovator. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas secara kelompok (grup) yang berisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Rida. Setiap kelompok akan mengampu beberapa inovator (OPD) yang nantinya para inovator secara intens dan berkelanjutan melakukan komunikasi dan melaporkan inovasinya kepada koordinator kelompok tersebut.
3. Melakukan revisi pada aplikasi Jarsiplus. Revisi ini dilakukan sekaligus untuk mengatasi beberapa menu dalam aplikasi yang dirasa kurang sesuai dengan kecepatan dan ketepatan penggunaan aplikasi Jarsiplus. Adapun setelah melakukan revisi pada aplikasi, perlu dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh individu di Bidang Rida. Bimtek ini sekaligus sebagai penyegaran berulang dan pemantapan ilmu bagi setiap individu di kemudian hari.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (strategis 2)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk peningkatan birokrasi	Indeks Inovasi Daerah	94,21	80,04	19,99

elayanan publik				
-----------------	--	--	--	--

abelMenggambarkan penggunaan sumber dana (alokasi anggaran) untuk mencapai sasaran strategis kedua. Kinerja anggaran adalah sebesar 80,04% dengan capaian kinerja 94,21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, upaya untuk mencapai kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi mencapai 19,99%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja terkait meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan/sub. Kegiatan pada bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kota Samarinda. Pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.318.149.186,- Tabel 3.14 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dilengkapi dengan rencana aksi yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua.

Tabel 3.14 Gambaran Singkat Program, kegiatan, sub kegiatan, & rencana aksi pendukung sasaran strategis 2 (2025)

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	AKSI
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi	%	79%	

	Daerah			
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	5	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	6	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	8	
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang dapat langsung Dimanfaatkan	Dokumen	4	

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Perubahan Belanja BAPPERIDA Kota Samarinda Tahun 2025 dalam tabel 3.20 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Belanja Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI		SILPA	KETERANGAN
			ANGGARAN (RP)	%		

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	28,261,375,398	27,112,993,307	95.94	1.148.382.091	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.948.000	303.894.580	98.36	5.053.150	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	190.024.000	187.558.900	98.70	2.465.100	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71,604,000	69,069,080	96.46	2.534.920	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.320.000	47.266.870	99.89	53.130	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,986,631,862	12.524.538.287	96.44	462.093.575	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,612,956,141	11,270,787,782	97.05	342,168,359	Fisik Sudah Tercapai, untuk pembayaran TTP tidak semua pegawai menerima 100%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,299,675,721	1,185,902,496	91.25	113,773,225	Fisik Sudah Tercapai
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	74,000,000	67,848,009	91.69	6,151,991	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai

C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000	200,000,000	100	-	Sudah Tercapai
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undang	200,000,000	200,000,000	100	-	Sudah Tercapai
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,457,085,333	2,258,498,687	91.92	198,586,646	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	95,000,000	79,248,439	83.42	15,751,561	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,480,225,333	1,428,904,010	96.53	51,321,323	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108,360,000	106,000,000	97.82	2,360,000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210,000,000	208,549,500	99.31	1,450,500	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463,500,000	337,058,740	72.72	126,441,260	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,000,000	98,737,998	98.74	1,262,002	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,583,211,600	1,507,244,997	95.20	75,966,603	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	264,600,000	213,560,000	80.71	51,040,000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai

2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360,500,000	356,400,000	98.86	4,100,000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Pengadaan Mebel	808,111,600	789,159,997	97.65	18,951,603	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000	148,125,000	98.75	1,875,000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,728,755,944	1,609,402,178	93.10	119,353,766	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	653,408,000	594,418,478	90.97	58,989,522	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,075,347,944	1,014,983,704	94.39	60,364,244	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,996,742,659	8,709,414,308	96.81	287,328,351	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	611,956,409	476,328,404	77.84	135,628,005	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85,000,000	65,741,000	77.34	19,259,000	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206,000,000	176,727,700	85.79	29,272,300	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	7,815,300,000	7,747,062,355	99.13	68,237,645	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai

	Bangunan Lainnya					
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	278,486,250	243,554,849	87.46	34,931,401	Efisiensi, Fisik Sudah Tercapai
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	10,142,513,743	9,519,829,317	93.86	622,684,426	
A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3,192,876,450	2,984,050,483	93.46	208,825,967	
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	995,792,100	901,267,126	90.51	94,524,974	Sisa pagu belanja Honorarium Narasumber (Ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan bersamaan dengan agenda lain)
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	472,264,250	466,054,631	98.69	6,209,619	Sisa belanja cetak (sisa hasil negosiasi), Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan (adanya penyesuaian harga satuan bulanan), Belanja perjalanan dinas biasa (sisa dana yang tidak bisa dispjkan)
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	167,024,900	166,736,900	99.83	1,505,750	Belanja Alat Tulis Kantor (sisa hasil negosiasi)
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	179,075,250	177,569,500	99.16	1,505,750	Belanja Alat Tulis Kantor (sisa hasil negosiasi), Belanja bahan cetak (sisa hasil negosiasi), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa hasil negosiasi)
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	349,234,125	343,841,225	98.46	5,392,900	Belanja Alat Tulis Kantor (sisa hasil negosiasi), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (sisa hasil negosiasi)
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	239,303,500	185,364,658	77.46	53,938,842	Belanja bahan cetak (sisa hasil negosiasi), Sisa pagu belanja Honorarium Narasumber (Ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bersamaan dengan agenda lain), Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengurangan Agenda Rapat Koordinasi), Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan (adanya penyesuaian harga satuan bulanan)
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	790,182,325	743,216,443	94.06	46,965,882	Belanja Alat Tulis Kantor (sisa hasil negosiasi), Belanja bahan cetak (sisa hasil negosiasi),

	Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Belanja Honorarium Narasumber (Ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bersamaan dengan agenda lain), Belanja Honorarium Tim Pelaksana (Pembatasan pemberian honor terhadap semua pegawai di instansi Pemkot Samarinda), Honorarium Penanggungjawab pengelola keuangan (adanya penyesuaian harga satuan bulanan), Belanja perjalanan dinas biasa (sisa dana yang tidak bisa dispjkan)
B	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,642,559,500	1,546,125,548	94.13	96,433,952	
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah	574,901,500	558,895,812	97.22	16,005,688	Belanja modal pembelian komputer (sisa hasil negosiasi), Honorarium Narasumber (Ada pembatalan dikarenakan terbentur dengan agenda lain), Penanggungjawab pengelola keuangan (adanya penyesuaian harga satuan bulanan), Belanja perjalanan dinas biasa (sisa dana yang tidak bisa dispjkan)
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembanguna SKPD	1,067,658,000	987,229,736	92.47	80,428,264	Belanja ATK (sisa hasil negosiasi), Belanja makan minum rapat (sisa hasil negosiasi), Belanja makan minum lapangan (sisa hasil negosiasi), Belanja modal pembelian komputer (sisa hasil negosiasi), Honorarium Narasumber (Ada pembatalan dikarenakan terbentur dengan agenda lain), Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Adanya pembatasan jumlah honor Tim Pelaksana Kegiatan yang diterima oleh ASN dan adanya mutasi pegawai), Aplikasi Geoportel (sisa hasil negosiasi), Penanggungjawab pengelola keuangan (adanya penyesuaian harga satuan bulanan), Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (menyesuaikan SSH) Belanja perjalanan dinas

						biasa (sisa dana yang tidak bisa dispjkan)
C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5,307,077,793	4,989,653,286	94.02	317,424,507	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4,275,486,500	4,084,117,332	95.52	191,369,168	Belanja Alat Tulis Kantor (sisa hasil negosiasi), Belanja Tenaga Ahli (Honor TWAP ada nya pengurangan anggota) Belanja perjalanan dinas,(sisa dana yang tidak bisa di spjkan)
2	Pengendalian Pelaksanan Kerjasama Daerah	43,760,000	35,837,500	81.90	7,922,500	Belanja honor pengelola keuangan, (pagu di bawah 50 juta tidak bisa mencairkan honor pengelola keuangan)
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	987,831,293	869,698,454	88.04	118,132,839	Belanja makan minum,(sisa hasil negosiasi), Honor, naras umber (tidak terlaksananya kegiatan tersebut), Belanja Makan Minum (Ada pembatalan dikarenakan terbentur dengan agenda lain) Belanja perjalanan dinas,(sisa dana yang tidak bisa di spjkan) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Adanya pembatasan jumlah honor Tim Pelaksana Kegiatan yang diterima oleh ASN dan adanya mutasi pegawai
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3,802,985,987	3,462,613,831	91.05	340,372,156	
A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,146,185,000	1,889,164,712	88.02	257,020,288	
1	Koordinasi Penyusunan Dukomen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	268,766,000	224,701,971	83.61	44,064,029	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dan honor narsum dikarenakan efesiensi

2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55,659,000	53,345,183	95.84	2,313,817	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan efesiensi
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Darah Bidang Pemerintahan	55,659,000	27,427,553	49.28	28,231,447	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum rapat dikarenakan efesiensi
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	658,858,000	606,948,860	92.12	51,909,140	Realisasi Pekerjaan Tercapai, ada sisa anggaran di makan dan minum dan honor narsum dikarenakan efesiensi
5	Koordinasi Penyusunan Dukomen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD dan RKPDP)	593,569,500	490,364,834	82.61	103,204,666	Realisasi pekerjaan tercapai, pagu tersisa dari makan minum yang tidak sempat dilaksanakan semuanya karena waktu berjalan dan tidak bisa digeserkan ke perjadi
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56,805,000	50,430,736	88.78	6,374,264	Realisasi pekerjaan tercapai, pagu tersisa dari makan minum yang sudah cukup pelaksanaannya
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53,463,000	46,456,455	86.89	7,006,545	Sisa anggaran dari cetak dan penggandaan, perjadi dan Honorarium Narsum dan panitia
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	403,405,500	389,489,120	96.55	13,916,380	Sisa anggaran dari Honorarium PPK, Narsum, dan Tim Kegiatan.

	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
B	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	976,124,750	943,485,514	96.66	32,639,236	
1	Koordinasi Penyusunan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	187,777,500	180,935,883	96.36	6,841,617	Sisa dari anggaran efisiensi yang melebihi 10 % (Honor keuangan) dan Sisa dari Hasil Tender/Seleksi
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	70,210,000	69,033,400	98.32	1,176,600	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69,794,000	68,943,000	98.78	851,000	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	74,666,500	72,390,200	96.95	2,276,300	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak
5	Koordinasi Penyusunan Dukumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	291,570,000	289,120,531	99.16	2,449,469	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak

	(RPJP, RPJMD dan RKPDP)					
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	68,316,500	66,391,50	97.18	1,925,000	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	62,357,750	57,516,000	92.24	4,841,750	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	151,432,500	139,155,000	91.89	12,277,500	Sisa dari anggaran efisiensi dan Sisa dari Hasil Tender/Seleksi
C	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	680,676,237	629,963,605	92.55	50,712,632	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD, dan RKPDP)	423,645,112	386,970,828	91.34	36,674,284	Sisa dari anggaran efisiensi dan Sisa dari Hasil Tender/Seleksi
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	86,570,750	82,547,600	95.35	4,023,150	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak

3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60,377,250	56,693,700	93.90	3,683,550	Merupakan Selisih Nilai HPS dengan nilai yang terkontrak
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastrukturn	110,083,125	103,751,477	94.25	6,331,648	Sisa persegeran anggaran dan Sisa dari Hasil Tender/Seleksi
IV	Program Penelitian dan Pengembangan	2,318,149,186	1,855,559,327	80.04	462,589,859	
A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	609,926,125	473,256,920	77.59	136,669,205	
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	111,460,250	108,543,75	97.38	2,916,500	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadi, dan laporan pendahuluan
2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	378,746,000	290,254,665	76.64	88,491,335	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada perjadi, dan laporan pendahuluan
3	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	119,719,875	74,458,505	62.19	45,261,370	Fisik sudah tercapai, Efisiensi pada Honorarium Tim
B	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	283,859,250	217,620,409	76.66	66,238,841	
1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	283,859,250	217,620,409	76.66	66,238,841	

C	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	825,837,436	714,100,109	86.47	111,737,327	
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	151,502,375	143,709,145	94.86	7,793,230	
2	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	353,887,750	259,290,550	73.27	94,597,200	
3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	105,121,812	99,612,392	94.76	5,509,420	
4	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	112,040,437	111,277,630	99.32	762,807	
5	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	103,285,062	100,210,392	97.02	3,074,670	
D	Pembangunan Inovasi dan Teknologi	598,526,375	450,581,889	75.28	147,944,486	
1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi Inovasi	6,547,750	5,567,000	85.02	980,750	
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovasi	178,318,750	100,268,980	56.23	78,049,770	-
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	413,659,875	344,745,909	83.34	68,913,966	
TOTAL		44,525,024,314	41.906.742.689	94,22	2.574.028.532	

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, anggaran DPPA BAPPERIDA Kota Samarinda belanja yang terserap sebesar Rp. 41,906,742,698,- atau 94,22 % dari total belanja 44,525,024,314,-

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran yang terserap BAPPERIDA Kota Samarinda dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaimana pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3.21 Perbandingan Pagu dan realisasi Anggaran Bapperida Kota Samarinda Tahun 2023-2025

TAHUN	2023	2024	2025
PAGU (RP)	38,528,671,921	40,091,085,004	44,525,024,314
REALISASI (Rp)	32,365,877,419	37,954,751,643	41,906,742,698
REALISASI (%)	84	92,80	94,22

Realisasi anggaran BAPPERIDA Kota Samarinda pada tahun 2025 sebesar 94,12% mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 yaitu : sebesar 92,80 %, sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar 84%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kota Samarinda Tahun 2025 disusun berdasarkan pengukuran capaian strategis organisasi sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025–2029. Tahun 2025, realisasi kinerja anggaran Bapperida Kota Samarinda mencapai 94,12%. Dari aspek realisasi target program/kegiatan yang mendukung target sasaran strategis, kinerja Bapperida Kota Samarinda mencapai 98,27%. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek-aspek sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 53 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja Bappeda tahun 2025 dapat dikategorikan **Sangat Tinggi** (di atas 91%). Uraian capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran pertama, yakni terkait meningkatnya Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah menunjukkan capaian sebesar 97,43%.
2. Sasaran kedua, yakni terkait meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk peningkatan birokrasi pelayanan publik menunjukkan capaian sebesar 96,31%
3. Dari kedua sasaran tersebut, rata-rata capaian organisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 96,87%

4. Realisasi anggaran Bapperida Kota Samarinda tahun 2025 adalah sebesar 94,22% sehingga secara keseluruhan (perangkat daerah), terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,78%

Selain hal-hal berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah, hasil evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga menjadi poin perhatian pimpinan dalam mengarahkan kinerja organisasi. Pasca diterimanya hasil evaluasi dari Inspektorat Kota Samarinda Tahun 2025, Bapperida Kota Samarinda melakukan upaya perbaikan, yakni dengan melaksanakan pemantauan/pengendalian kinerja dengan lebih konsisten, penuh komitmen, serta yang memenuhi prinsip akuntabel. Salah satunya adalah melaksanakan kendali kinerja personel dalam organisasi yang dipantau tidak hanya tiap tiga bulan (triwulan) namun dilakukan tiap bulan. Mengingat sistem yang dimiliki oleh Bapperida Kota Samarinda pada tahun 2025 belum dapat mengakomodir pemantauan bulanan, maka upaya perbaikan melalui pemantauan bulanan dilakukan secara manual. Penggunaan mekanisme ini memudahkan pimpinan untuk mengetahui bidang-bidang yang telah melakukan pemantauan kinerja bulanan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja. Upaya perbaikan yang dilakukan ini perlahan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja organisasi ditinjau dari penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang telah diagendakan serta rata-rata capaian kinerja. Pada tahun 2025, rata-rata capaian kinerja Bapperida Kota Samarinda adalah sebesar 98,27% dengan realisasi anggaran sebesar 94,22%. Setelah dilakukan perbaikan melalui penerapan hasil evaluasi, utamanya evaluasi terkait akuntabilitas, kinerja Bapperida Kota Samarinda meningkat. Sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, tahun 2024 rata-

rata capaian kinerja Bapperida Kota Samarinda mencapai 97,21 % dengan realisasi anggaran sebesar 92,80 %. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian sebesar 1,06 %.

B. Upaya Perbaikan Kedepan

1. Menjadikan hasil evaluasi sebagai salah satu aspek penting dalam perbaikan kinerja, terutama kinerja strategis organisasi.
2. Memperkuat pemantauan kendali pelaksanaan program/kegiatan agar memiliki progres yang baik, tepat sasaran, menjalankan prinsip yang akuntabel serta prinsip pemerintahan yang baik (good governance) lainnya
3. Mengimplemetasikan pemantauan perjanjian kinerja hingga level staf dengan durasi atau periode waktu bulanan dengan memanfaatkan teknologi agar dapat lebih efisien serta konsisten
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan mitra kerja terutama agar kinerja strategis organisasi sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana strategis dapat mencapai target yang ditetapkan
5. Memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapperida Kota Samarinda untuk mendukung kinerja organisasi



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SAMARINDA**

Jl. Dahlia No. 81 Kota Samarinda - Kalimantan TIMUR
Telp (0541) 203785 - Fax (0541) 732072
www.bappeda.samarindakota.go.id